

SEKILAS PENGEMBANGAN KURIKULUM[1]

Oleh Zamzani

FBS Universitas Negeri Yogyakarta

1. Pendahuluan

Pengembangan kurikulum, termasuk di dalamnya revisi kurikulum (?), suatu lembaga pendidikan, yang dalam hal ini perguruan tinggi, merupakan hal yang biasa. Kurikulum suatu perguruan tinggi mestilah selalu dapat mengantisipasi-pasi perkembangan akan kebutuhan pemangku kepentingan (*stake holder*). Ketika kebutuhan pemangku kepentingan berubah, dan kurikulum yang ada belum dapat mengakomodasi kebutuhan pemangku kepentingan, kurikulum mestinya direvisi atau bahkan diubah. Itulah sebabnya kurikulum suatu lembaga pendidikan cenderung secara periodik perlu dilakukan perubahan atau revisi. Kurikulum yang ada pada umumnya belum dapat mengantisipasi secara akurat terhadap peluang adanya perubahan atau perkembangan kebutuhan pemangku kepentingan.

Persoalannya, mengapa kurikulum dinyatakan belum dapat mengantisipasi perubahan kebutuhan pemangku jabatan? Untuk menjawab persoalan ini ternyata tidak dapat begitu saja diberikan, meski dengan *common sense* sekalipun, seperti saat kurikulum disusun. Persoalan berikutnya, pernahkah suatu kurikulum yang sedang berlaku dievaluasi? Bagaimana mestinya suatu kurikulum tersebut disusun? Pertanyaan terakhir ini kiranya perlu dijawab, dan selanjutnya bagaimana dapat dilakukan secara baik.

2. Konsep Kurikulum

Masyarakat pendidik pada umumnya berpandangan bahwa mereka serba mengetahui apa yang mesti dilakukan dan dipelajari oleh peserta didiknya untuk dapat mencapai suatu kompetensi atau kemampuan yang diidealkan oleh kalangan masyarakat pendidik itu sendiri. Artinya, guru merumuskan segala sesuatu yang mesti diajarkan atau yang dipelajari siswa atas dasar kebutuhan siswa yang dirumuskan oleh guru, yang bisa jadi tidak diperlukan oleh si subjek didik. Demikian halnya penyusun kurikulum merumuskan kompetensi yang mesti di-capai oleh subjek didik melalui sejumlah mata pelajaran/mata kuliah atau *subject matter* tidak berdasarkan kebutuhan subjek didik atau pun pemangku kepentingan, melainkan atas sesuatu yang dikehendaki atau yang diidealkan oleh si penyusun kurikulum itu sendiri. Jarang sekali yang rumusan target kompetensi dalam suatu kurikulum didasarkan atas masukan dari pemangku kepentingan, misalnya orang tua, perusahaan, atau lembaga yang diperkirakan sebagai pemangku kepentingan, sebagai pengguna lulusan. Tentu semua itu terjadi disebabkan konsep kurikulum yang diikuti oleh penyusun kurikulum itu sendiri yang mengabaikan langkah dan pola pengembangan kurikulum itu demikian.

Konsep kurikulum itu sendiri memang mengalami perubahan dari waktu ke waktu sehingga dijumpai banyak wawasan atau batasan tentang kurikulum. Ada yang berpandangan bahwa kurikulum terkait dengan daftar mata pelajaran atau daftar mata kuliah yang mesti dipelajari atau ditempuh oleh subjek belajar (Ross, 2000: 8; Kelly, 2009: 7; Nasution, 1980:1). Konsep ini mirip sekali dengan pengertian kurikulum yang dinyatakan sebagai perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan,

atau perangkat mata kuliah mengenai bidang keahlian khusus (Tim Penyusun Kamus P3B, 1994: 546; Hornby, 1984: 212). Pandangan tentang kurikulum yang demikian ini tentulah boleh diikuti sebagai pengertian umum, bukan sebagai istilah.

Konsep kurikulum sebagai istilah mengacu pada seluruh aktivitas yang dirancang atau diorganisasi yang diarahkan untuk membentuk intelektual, personal, sosial, dan fisik subjek belajar, baik formal, maupun informal atau ekstrakurikuler (Ross, 2000: 9). Konsep ini memberikan gambaran yang jelas bahwa subjek didik dikembangkan aspek kompetensi akademiknya atau intelek-tualnya, kompetensi pribadi atau personalnya, kompetensi sosial. Aspek yang terakhir, agaknya dikenakan pada subjek belajar yang secara fisik masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Khusus kurikulum yang terkait dengan pendidikan tenaga kependidikan mestinya masih ada kompetensi yang dikem-bangkan, yaitu kompetensi pedagogik. Secara khusus, kurikulum pendidikan tinggi dinyatakan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi (Kepmendiknas, Nomor 232/U/2000).

Dalam dunia pendidikan biasanya ada tim penyusun kurikulum yang menghasilkan seperangkat program atau aktivitas yang dirancang dalam kuri-kulum, dan ada pelaksana atau pengembang kurikulum yaitu guru atau dosen. Apa yang diprogramkan dalam kurikulum ada kemungkinan tidak semuanya terakomodasi dalam pelaksanaan. Oleh karena itu, kemudian dikenal adanya kurikulum yang dirancang atau yang diistilahkan *official curriculum/planned curriculum*, dan kurikulum yang terealisasi yang diistilahkan *actual curriculum/ received curriculum* (Kelly, 2009: 11).

Bagaimana dengan kurikulum yang ada di perguruan tinggi? Idelanya, apa yang terdapat dalam kurikulum yang dirancang sama atau tidak jauh berbeda dengan kurikulum yang terealisasi. Hal itu sangat dimungkinkan karena dosen sebagai pengembang dan pelaksana kurikulum terlibat juga dalam penyusunan kurikulum.

3. Pengembangan Kurikulum

Di dalam pengembangan atau perencanaan kurikulum setidaknya ada empat hal yang mesti diperhatikan, yaitu tujuan (*goals/objectives*), isi (*content/ subject matter*), metode/prosedur, dan evaluasi (Kelly, 2009: 20). Tujuan pada prinsipnya berupa seperangkat kompetensi yang diharapkan dicapai dan dikuasai oleh subjek belajar. Isi pada prinsipnya berupa pengalaman belajar atau materi ajar yang mesti dilakukan oleh subjek belajar untuk mencapai tujuan. Metode atau prosedur merupakan pengorganisasian pengalaman belajar untuk mencapai tujuan secara efektif. Evaluasi terakit dengan instrumentasi untuk mengukur pencapaian tujuan.

Dalam sistem pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, tujuan itu dinyatakan dengan standar kompetensi lulusan (SKL) atau yang biasa dikenal dengan standar kompetensi (SK) saja. Standar kompetensi tersebut biasanya dijabarkan lagi menjadi beberapa kompetensi dasar. Persoalannya, dari mana rumusan standar kompetensi itu mesti diperoleh. Idealnya, standar kompetensi itu dirumuskan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan di masa yang akan datang, bukan pada saat kurikulum itu disusun. Sebab, bila didasarkan pada saat kurikulum disusun, nanti bias jadi saat subjek belajar lulus sudah tidak relevan lagi.

Untuk mencapai kompetensi yang telah dirumuskan diperlukan pengalaman belajar tertentu. Pengalaman belajar itu dapat dicapai melalui isi atau materi ajar, yang kemudian dapat dimunculkan melalui nomen mata pelajaran atau mata kuliah. Oleh karena itu, tidak pada tempatnya bila dalam penyusunan atau pengembangan kurikulum dimulai dengan menetapkan mata pelajaran atau mata kuliah lebih dulu, sebelum menentukan kompetensi yang mesti dicapai oleh subjek belajar.

Pengorganisasian pengalaman belajar atau materi ajar yang kemudian muncul dalam mata kuliah tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan, yaitu kompetensi. Pada bagian ini termasuk di dalamnya pengelompokan materi atau mata kuliah, pembobotan sks mata kuliah, distribusi atau sekuensi mata kuliah dan sebagainya. Pengelompokan mata kuliah tersebut dapat mengacu kepmen-diknas RI nomor 232/U/2000 dan 045/U/2002. Dengan mengacu kepmendiknas tersebut, mata kuliah dapat dikelompokkan menjadi lima mata kuliah, yaitu mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK), mata kuliah keilmuan dan keterampilan (MKK), mata kuliah keahlian berkarya (MKB), mata kuliah perilaku berbaya (MPB), dan mata kuliah kehidupan bermasyarakat (MBB).

Pengembangan evaluasi untuk menentukan pencapaian kompetensi selama ini dikenal ada penilaian acuan norma (PAN), dan penilaian acuan patokan/ kriteria (PAP/PAK). Kurikulum berbasis kompetensi sudah semestinya digunakan penilaian acuan patokan/kriteria. Dalam penilaian acuan patokan/kriteria terdapat dua kategori, yaitu lulus atau gagal/tidak lulus. Bila dinyatakan lulus artinya subjek belajar telah mencapai kompetensi yang ditetapkan. Persoalannya, selain itu dalam kenyataan masih dituntut pula membuat peringkat atau grade. Oleh karena itu, dapat dimaklumi bila ada kategorisasi lulusan A, B, C, D, E; A, B, C, D; A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D dan sebagainya.

Dari uraian singkat tersebut dapat dirangkum bahwa dalam pengembangan atau penyusunan kurikulum terdapat prosedur: (1) perumusan tujuan atau standar kompetensi lulusan, (2) penentuan isi/*subject matter*, termasuk di dalamnya nomen mk dan bobot sks, deskripsi mk, (3) metode/prosedur, dan (4) sistem evaluasi.

4. Pedoman Pengembangan Kurikulum

Sebelum kegiatan penyusunan, pengembangan, atau revisi kurikulum dilakukan diperlukan pedoman atau rambu-rambu penyusunan kurikulum. Pedoman atau panduan itu minimum berisi (1) prinsip dasar pengembangan kurikulum dan acuan dasar yuridisnya termasuk visi dan misi lembaga yang biasanya termaktub dalam statuta, (2) beban studi, (3) mata kuliah, pengkodean, dan pengelompok-an mata kuliah, (4) format kurikulum.

Prinsip dasar pengembangan kurikulum mengacu “filosofi” yang diikuti oleh lembaga pengembang kurikulum. Acuan yuridis pengembangan atau penyusunan kurikulum terkait dengan Undang-undang, Permen, Kepmen, sampai pada Peraturan Universitas, Fakultas, Keputusan Rektor. Beban studi merupakan banyaknya sks minimum yang harus diselesaikan oleh mahasiswa untuk dapat dinyatakan lulus suatu jenjang pendidikan. Mata kuliah merupakan nomen materi/isi kajian sehingga diperlukan deskripsi mata kuliah, dan untuk keperluan administrasi mata kuliah itu diberikan kode, misalnya mata kuliah umum dan sksnya dengan kode tertentu. Format kurikulum terkait dengan organisasi sajian kurikulum.

5. Penutup

Berikut ini disajikan catatan akhir dari pembicaraan tentang pengembangan atau penyusunan kurikulum sebagai berikut.

- 1) Konsep tentang kurikulum akan menentukan aspek yang termuat dalam suatu “bangunan” kurikulum yang dihasilkan.
- 2) Prinsip dasar pengembangan kurikulum akan menentukan rumusan tujuan.
- 3) Langkah pengembangan kurikulum dimulai dari pe1) perumusan tujuan (2) penentuan isi/*subject matter*, (3) perumusan metode/prosedur, dan (4) penentuan sistem evaluasi.
- 4) Pedoman pengembangan kurikulum diperlukan sebagai panduan tim pengembang kurikulum dalam menjalankan tugasnya.

Daftar Pustaka

- Beyer, London E. dan Michel W. Apple. 1998. *The Curriculum: Problems, Politics, and Possibilities*. New York: State University of New York.
- Hornby, A.S. 1985. *Oxford Advanced learner,s Dictionary af Current English*. Oxford: Oxford University Press.
- Kelly, A.Vic. 2009. *The Curriculum: Theory and Practice* (6Th Edition). New Delhi: Sage Publication Ltd.
- Kepmendiknas RI Nomor 232/U/2000.
- Kepmendiknas RI Nomor 045/U/2002.
- Nasution, S. 1980. *Asas-asas Kurikulum*. Jakarta: Jambatan.
- Ross, Alistair. 2000. *Curriculum: Construction and Critique*. New York: Palmer Press.
- Tim Penyusun Kamus P3B. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Universitas Negeri Yogyakarta. 2002. *Rambu-rambu Penyusunan Kurikulum 2002 Universitas negeri Yogyakarta*. Tidak Terbit.
- Universitas Negeri Yogyakarta. 2009. *Rambu-rambu Penyusunan Kurikulum 2009 Universitas negeri Yogyakarta*. Tidak Terbit.

Yogyakarta, April 2010

[1] Dipresentasikan dalam pengembangan/revisi kurikulum di FKIP Universitas Muhammadiyah Perwokerto, Jawa Tengah, 23 April 2010